

---

---

## **PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR (Studi Kasus di Kawasan Taman Nasional Wakatobi (TNW))**

Yusriadin<sup>1\*</sup>, Tjandra Buana<sup>2</sup>, Mardin<sup>2</sup>, Muhammad Aldin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

<sup>2</sup> Jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

\* **Corresponding Author** : [yusriadin@uho.ac.id](mailto:yusriadin@uho.ac.id)

### **To cite this article:**

Yusriadin, Y., Buana, T., Mardin, M., & Aldin, M. (2024). Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Kawasan Taman Nasional Wakatobi (TNW)). *JIPPM (Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat)*, 4(2), 156 – 163. <http://dx.doi.org/10.56189/jippm.v4i2.14>

**Received:** 16 Maret 2024; **Accepted:** 27 Juni 2024; **Published:** 30 Juni 2024

### **ABSTRACT**

The rise of threats or intersections from marine resource utilization activities that are not environmentally friendly and do not pay attention to the sustainability and sustainability of marine resources results in less economic stability of coastal communities. Therefore, it is necessary to manage and supervise the utilization of potential marine resources so as to ensure the sustainability of marine resources, improve and encourage economic strengthening of coastal communities, especially fishermen. The purpose of this study is to examine the role of local institutions in marine resources management as an effort to improve the economy of coastal communities in the Wakatobi National Park area. The informants used in this study were fishermen, members or heads of fishermen groups, members or heads of customary groups, members or heads of non-governmental organizations. The types of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques use interviews, observations, Focus Group Discussion (FGD) and literature studies. The data analysis used in this paper is qualitative descriptive analysis. The results showed that the role of local institutions in marine resources management as an effort to improve the economy of coastal communities in the Wakatobi National Park area, namely: 1) socializing the use of environmentally friendly traditional fishing gear so as to maintain minimum size and fishing season, fish populations remain sustainable, maintain fish production in the long term; 2) apply marine management and protection methods based on local wisdom (*Sasi Method*); 3) Advancing conservation partnership programs as an effort to encourage community welfare and conservation area sustainability; 4) encourage the involvement of fishing groups in the processing and processing of catches such as fish drying, preservation or seafood processing; 5) Support local economic empowerment, create local jobs and help coastal communities overcome poverty through cooperation with financial institutions and training institutions in coastal economic enterprises; 6) supervise and regulate the sustainable use of marine resources based on indigenous peoples as an effort to maintain the carrying capacity of the environment, livelihoods or the main economic resources of coastal communities; and 7) help promote sustainable coastal and marine tourism.

**Keywords:** *Local Institutions, Marine Resources, Economy, Coastal Communities.*

## PENDAHULUAN

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dengan ciri kepulauan, memiliki jumlah pulau sebanyak 540 pulau, dan 115 pulau diantaranya telah berpenduduk, memiliki luas perairan sebesar 114.879 km<sup>2</sup> atau sebesar 75% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara administratif, memiliki 17 Kabupaten/Kota, dan 16 Kabupaten/Kota diantaranya terletak di wilayah pesisir. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maupun daerah melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut yang tersedia secara optimal. Namun, sejalan dengan besarnya potensi sumberdaya laut Provinsi Sulawesi Tenggara, selalu ada ancaman ataupun gangguan dari aktivitas-aktivitas pemanfaatan sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan dan tidak memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian sumber daya laut. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya laut sehingga bukan hanya menjamin kelestarian sumber daya laut namun juga mampu meningkatkan serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir khususnya nelayan.

Wakatobi sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan tahun 2002 sebagai kawasan konservasi yang mengelola keanekaragaman hayati laut, dengan luas laut mencapai 97% dari luas daratan, Wakatobi sebagai *Biodiversity Hotspot* bagi perairan Timur Indonesia. Tercatat 396 *species* karang keras dan 942 *species* ikan karang ditemukan di kawasan Taman Nasional Wakatobi (Firmansyah et al., 2016). Kekayaan sumber daya laut Taman Nasional Wakatobi menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat khususnya nelayan yang berada pada wilayah pesisir, sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan. Populasi ikan yang beragam di taman ini, termasuk spesies kelinci berbintik emas, ikan kakatua, kaisar, kerapu, dan trevalie, mendukung berbagai metode penangkapan ikan seperti muroami, *speargun*, dan penangkapan tangan, terutama di sekitar Pulau Binongko (Prihatiningsih et al., 2023). Permasalahannya adalah belum jelas dan tegasnya batas-batas ruang wilayah kelola adat yang dapat disinergikan dengan aturan pemanfaatan ruang pada konteks zonasi Taman Nasional Wakatobi. Jika arahan ruang atau wilayah adat telah memiliki batas-batas yang jelas, maka bentuk implementasi program dapat dikembangkan antara kelompok adat dengan pemerintah dan stakeholder lainnya.

Awal tahun 2000-an, wisatawan asing yang berkunjung di Pulau Hoga dan Kaledupa semakin meningkat. Hal ini membawa perubahan pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kaledupa kala itu masih masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton, karena Wakatobi baru mekar sebagai kabupaten pada tahun 2003. Dalam waktu bersamaan, kapal ikan berlabuh di antara Pulau Hoga dan Pulau Kaledupa. Masyarakat dan pembudidaya rumput laut di sekitar Desa Buranga merasa terancam dengan kehadiran kapal tersebut. Hasil tangkapan nelayan berkurang, begitu juga dengan pembudidaya rumput laut di sekitar Desa Sombano, Buranga, dan Waduri yang semakin gagal panen. Hal ini membawa kerugian tidak sedikit bagi masyarakat yang saat itu mulai berpindah dari nelayan penangkap ikan menjadi pembudidaya rumput laut. Pada masa tersebut juga, sosialisasi zonasi Taman Nasional Wakatobi ditentukan tanpa melibatkan masyarakat, khusus nelayan.

Merespon berbagai permasalahan tersebut, masyarakat, yang juga merupakan pembudidaya rumput laut mulai mengorganisir masyarakat lainnya dan membentuk kelompok. Berupaya membangun kesadaran bersama dan jejaring di pulau, karena gerakan secara kolektif akan membuat tekanan yang jauh lebih besar daripada bekerja sendiri. Mereka bersama-sama mendatangi kapal ikan tersebut untuk menanyakan izin berlabuh dan izin usaha kapal tersebut.

Permasalahan lainnya adalah terdapat sebagian masyarakat pengguna sumber daya laut melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya laut yang berpotensi merusak ekosistem terumbu karang dan biota laut lainnya seperti aktivitas penambangan pasir menggunakan alat kompresor yang berdampak serius pada kerusakan ekosistem lamun. Kemudian penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan seperti bus dan bom. Aprilla et al., (2022) menekankan bahwa praktik penangkapan ikan yang merusak, didorong oleh motif ekonomi, sosial, dan budaya, atau bahkan ketidaktahuan akan hukum, dapat sangat mengurangi produktivitas sumber daya laut dan membahayakan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, maka dibentuk kelembagaan lokal seperti kelompok adat dan kelompok nelayan untuk membantu organisasi pemerintah seperti Balai Taman Nasional Wakatobi dalam menjaga kelestarian laut dan ketersediaan sumber daya laut sebagai sumber utama perekonomian masyarakat pesisir. Hal ini disebabkan karena kekuatan kelembagaan lokal yang ada di daerah pesisir mempunyai peran sangat strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi. Kelembagaan lokal baik formal maupun non formal, mengalami tantangan berat dibawah arus modernisasi dengan alih teknologi yang cepat, khususnya dalam mengelola sumberdaya laut. Warner (2014)

menekankan perlunya norma-norma konservasi modern dan mekanisme pembangunan, seperti transfer teknologi dan pembangunan kapasitas untuk memastikan pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumberdaya laut sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di kawasan Taman Nasional Wakatobi.

## METODE PENELITIAN

Lokasi dilaksanakan berdasarkan studi kasus, yaitu di kawasan Taman Nasional Wakatobi (TNW) pada tahun 2019 dan 2022. Informan yang digunakan dalam tulisan ini adalah orang yang paling mengetahui atau terlibat langsung dalam kegiatan pemanfaatan atau penggunaan sumberdaya laut di kawasan TNW. Informan, meliputi: nelayan, anggota atau ketua kelompok nelayan, anggota atau ketua kelompok adat, anggota atau ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diambil dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi literatur. Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu: a) reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada data lapangan yang telah terkumpul. Dipilih, dalam arti menentukan derajat relevansinya dengan maksud tulisan. Selanjutnya data atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan; b) penyajian data, yaitu suatu penyajian informasi dalam bentuk narasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan; c) penarikan kesimpulan yaitu tahapan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Disamping menyandarkan pada klarifikasi data, juga memfokuskan pada abstraksi data yang tertuang dalam bagan. Simpulan dilakukan setelah proses pengumpulan data berakhir, dan simpulan perlu diverifikasi agar benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, mengingat ketergantungan masyarakat pesisir yang cukup tinggi terhadap pemanfaatan sumber daya laut. Pomeroy & Rivera-Guieb, (2005) menjelaskan bahwa kelembagaan lokal sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Kelembagaan lokal pada dasarnya merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan dan visi yang sama. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, penting bagi kelembagaan lokal untuk bekerja secara aktif bersama stakeholder lainnya dan mengambil tindakan yang berkelanjutan untuk menjaga lingkungan dan mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Nugroho et al., (2024); Rialdy & Putri, (2022) keduanya menekankan peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal yang berfokus pada keberhasilan program dalam meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat. Secara umum kelembagaan lokal di Kabupaten Wakatobi terdiri dari kelompok nelayan, kelompok adat dan kelompok masyarakat.

### Kelompok Nelayan

Kelompok nelayan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa nelayan yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Sihite, 2020). Kelompok perikanan memainkan peran penting dalam pemanfaatan sumber daya laut, mencakup berbagai kegiatan dan interaksi yang berdampak baik terhadap lingkungan maupun ekonomi. Kelompok nelayan di kawasan Taman Nasional Wakatobi (TNW) tumbuh sebagai respon terhadap perubahan sosial dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya laut serta didorong oleh kesamaan latar belakang sosial ekonomi sebagai nelayan. Kelompok nelayan di kawasan TNW dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelompok Nelayan di Kawasan Taman Nasional Wakatobi (TNW).

No.	Kelompok Nelayan	Desa	Kecamatan
1	Kelompok Nelayan Sanggeh Kami		
2	Kelompok Nelayan Mitra Sunu		
3	Kelompok Nelayan Tuna Bersinar	Mola Bahari	Wangi-Wangi Selatan
4	Forum Nelayan Pada Kauang Sama		
5	Kelompok Nelayan Dewara	Darawa	Kaledupa Selatan
6	Forum Kemitraan Nelayan Desa Horuo	Horuo	Kaledupa
7	Forum Kemitraan Nelayan Mantigola	Mantigola	Kaledupa

Sumber: Data Primer, 2023.

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa Kelompok Nelayan Sanggeh Kami, Mitra Sunu, Tuna Bersinar dan Forum Nelayan Pada Kauang Sama merupakan kelompok dampingan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW) yang secara administratif berada di Desa Mola Bahari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dengan cara mensosialisasikan penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan, yang disebut *Kedo-Kedo*. *Kedo-Kedo* merupakan alat pancing yang terbuat dari benang sutra, marlo dan benang emas, yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat bajo, biasa dipakai untuk menangkap ikan di wilayah karang. Alat ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, sangat efektif untuk memancing di daerah karang, mencerminkan hubungan mendalam Bajo dengan lingkungan laut mereka. Orang-orang Bajo, yang dikenal dengan pemukiman pesisir dan budaya maritim mereka yang unik, telah mengembangkan berbagai teknik dan alat penangkapan ikan yang selaras dengan praktik berkelanjutan dan kearifan lokal mereka. 'Hukum hidup' mereka mencakup larangan terhadap kegiatan berbahaya seperti menghancurkan karang dan membunuh kura-kura, yang menggarisbawahi komitmen mereka untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut (Harun, 2022; Monteiro-Rodrigues et al., 2023).

Penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan seperti *Kedo-Kedo* cenderung lebih selektif dalam menangkap spesies target, tidak merusak terumbu karang sehingga nelayan dapat menjaga sumber daya ikan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang, dan hasil tangkapan cenderung spesies yang berkualitas dan memiliki nilai jual cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Carvalho et al., (2021); Ophman et al., (2023) menunjukkan bahwa alat tangkapan ikan selektif, seperti tali tangan dan senapan tombak, menargetkan komunitas ikan tertentu dengan tumpang tindih minimal, sehingga mengurangi tekanan pada spesies non-target dan melestarikan keanekaragaman hayati. Kelompok nelayan berperan dalam pengelolaan sumber daya laut seperti menjaga ukuran minimum dan musim tangkap ikan, yang dapat membantu menjaga populasi ikan tetap berkelanjutan. Rumolo (2023) berpendapat bahwa pengelolaan perikanan yang efektif melibatkan kombinasi kontrol input, kontrol output, dan langkah-langkah teknis, yang semuanya dirancang untuk menyelaraskan dengan tujuan perikanan strategis dan arahan kebijakan. Hal ini penting karena untuk menjaga daya dukung lingkungan dan produksi ikan dalam jangka panjang.

Kelompok Nelayan Dewara berasal dari Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan, yaitu pulau karang ditengah laut Wakatobi yang pemenuhan kebutuhan hidupnya sepenuhnya mengandalkan sumber daya laut. Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa masyarakat Desa Darawa sebagian besar membudidayakan rumput laut dan gurita di laut lepas. Bentuk peran kelompok nelayan Dewara dalam pengelolaan sumber daya laut adalah menerapkan metode *Sasi*, yang berarti kawasan yang dikelola. Metode ini digunakan dalam pengelolaan dan perlindungan laut yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Metode *Sasi* merupakan sistem buka tutup didaerah budidaya rumput laut dan gurita selama 3 bulan. Metode ini semacam jeda waktu dalam memanfaatkan hasil laut, yaitu selama tiga bulan masyarakat Desa Darawa maupun masyarakat dari luar Desa Darawa dilarang memasuki area *Sasi* yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan karena periode pertumbuhan gurita adalah tiga bulan. Setelah tiga bulan, masyarakat di Desa Darawa akan membuka wilayah *Sasi* dan memperbolehkan untuk memanfaatkan hasil laut, serta menutup wilayah *Sasi* di area lainnya, begitu seterusnya.

Penerapan metode *Sasi* oleh kelompok nelayan Dewara, selain bertujuan untuk menjaga dan melindungi kelestarian laut, juga menjamin ketersediaan sumber daya laut untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini juga diterapkan di kepulauan maluku, bahwa metode *sasi* terutama digunakan untuk mengelola pertanian rumput laut dengan mengatur waktu tanam dan panen untuk mengurangi konflik dan memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Kaya et al., 2018). Hasil penerapan metode ini selain mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan, juga mampu meningkatkan produksi rumput laut karena kurangnya aktivitas yang

mengganggu pertumbuhan rumput laut di kawasan budidaya serta mampu menjaga perekonomian masyarakat di Desa Darawa cukup stabil.

Forum Kemitraan Nelayan Desa Horuo dan Desa Mantigola yang secara administratif berada di Kecamatan Kaledupa, merupakan kelompok dampingan BTNW yang mengembangkan budidaya lobster mutiara, dibentuk dengan tujuan untuk memajukan program kemitraan konservasi sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kawasan konservasi. Pemberian bantuan oleh BTNW didasarkan pada harapan dan cita-cita agar pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam mengelola TNW, masyarakat selalu ditempatkan sebagai subyek dalam pengelolaan kawasan konservasi bersama pengelola kawasan. Selain itu, beberapa kelompok nelayan terlibat dalam pengolahan dan pemrosesan hasil tangkapan seperti pengeringan ikan, pengawetan atau pengolahan makanan laut lainnya. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah terhadap produk mereka dan menciptakan peluang bisnis lokal. Dengan mendukung kelompok nelayan, ekonomi lokal dapat diberdayakan. Hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan lokal dan membantu masyarakat pesisir untuk mengatasi kemiskinan. Asiaty & Nawawi, (2017) berpendapat bahwa keterlibatan kelompok nelayan dapat meningkatkan peluang pendapatan bagi nelayan serta memperluas peluang pasar untuk produk ikan olahan.

### **Kelompok Adat**

Pengelolaan sumber daya laut perlu mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal. masyarakat adat memiliki otoritas yang signifikan dan pengetahuan tradisional dalam mengelola perikanan, yang sangat penting untuk penangkapan ikan dan budidaya ikan (Yayi Laksmi & Prima Dewi, 2022). Praktik pengelolaan sumber daya tradisional, termasuk hak penangkapan ikan dan kepemilikan laut, berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan sosial, membentuk sistem pengetahuan-praktik-kepercayaan yang kompleks yang melengkapi praktik konvensional (Yiu, 2022). Oleh karena itu, terdapat beberapa lembaga adat yang ikut berperan serta dalam mengelola sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Wakatobi.

Tabel 2. Lembaga Adat di Kawasan Taman Nasional Wakatobi (TNW)

No.	Lembaga Adat	Pulau
1	Lembaga Adat Liya Raya	Wangi-Wangi
2	Lembaga Adat Sara Kapota	Kapota
3	Lembaga Adat Barata Kahedupa	Kaledupa
4	Masyarakat Adat Waha	Tomia
5	Masyarakat Adat Tongano	Tomia
6	Kerajaan Adat Sarano Wali	Binongko

Sumber: Data Primer, 2023.

Keterlibatan lembaga adat berperan penting dalam menopang kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan (aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan) di Taman Nasional Wakatobi. Studi yang dilakukan oleh Marlina et al., (2020) menyatakan bahwa pada komunitas Bajo Mola, mereka mengintegrasikan kebijaksanaan tradisional seperti duata sangal, parika, dan pamali, yang penting untuk ekowisata dan mencerminkan hubungan mendalam mereka dengan laut sebagai sumber kehidupan dan tradisi. Aspek sosial yaitu mengatur perilaku masyarakatnya, aspek ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir atau nelayan, dan aspek lingkungan yaitu menjaga kelestarian dan perlindungan sumber daya laut.

Lembaga Adat Liya Raya atau biasa disebut *miantu'u liya* berperan dalam mengendalikan perilaku masyarakatnya yang mengancam kelestarian lingkungan laut dengan cara koersif, yaitu pengendalian dengan menekankan pada tindakan yang bersifat memaksa warga masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.

Lembaga Adat Sara Kapota merupakan lembaga yang berada di wilayah Pulau Kapota. Berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan terutama untuk pengawasan dan perlindungan lokasi Parim-Pari, yaitu lokasi *temporary Closure* untuk perikanan gurita.

Lembaga Adat Barata Kahedupa, berasal dari Pulau Kaledupa yang merupakan mitra pemerintah dalam pelestarian budaya, adat istiadat, agama dan sejarah. Berperan penting dalam pengelolaan wilayah sumber daya laut, yaitu dibagi menurut adat, antara lain *Tampe Nu Mafi* adalah area permukiman warga yang dilindungi karena terdapat sumber daya pasir dan bakau serta diatur pemanfaatannya, kemudian *Namo* adalah area perairan laut yang dilindungi dan diatur pengambilan manfaatnya. Sama halnya dengan masyarakat adat



Waha dan masyarakat adat Tongano, dibentuk untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya laut di TNW.

Kerajaan Adat Sarano Wali yang berada di Pulau Binongko, juga merupakan mitra pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut di TNW. Dikuatkan dengan Keputusan Pemerintah Adat Sarano Wali Kecamatan Binongko Nomor: 189.1/01/ADAT/2013, tentang Susunan Pemangku Adat Sarano Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Sarano Wali Pulau Binongko di Kabupaten Wakatobi. Berperan penting dalam mengawasi dan mengatur penggunaan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut. pengelolaan yang bijak dapat menjaga daya dukung lingkungan dan mendukung mata pencaharian dan sumber ekonomi utama masyarakat pesisir. Artinya bahwa kelembagaan lokal dapat merancang dan mengimplementasikan peraturan yang mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

### **Kelompok Masyarakat**

Komunitas nelayan adalah kelompok yang beragam dan beragam yang dicirikan oleh dinamika sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan yang unik. Sebagian besar tinggal di daerah pesisir, komunitas-komunitas ini sering bergantung pada penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama mereka (Kumalasari et al., 2023; Nurcahyani et al., 2022). Kelompok masyarakat dibentuk atas dasar adanya tingkat kesadaran para nelayan atau masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut sebagai upaya peningkatan ekonomi. Adapun kelompok masyarakat di kawasan Taman Nasional Wakatobi sebagai berikut.

Tabel 3. Kelompok Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Wakatobi (TNW)

No.	Kelompok Masyarakat	Lokasi
1	Komunitas Nelayan Wangi-Wangi (KOMANANGI)	Wangi-Wangi
2	Forum Kahedupa Toudani (FORKANI)	Kaledupa
3	Komunitas Nelayan Tomia (KOMUNTO)	Tomia
4	Forum Nelayan Binongko (FONEB)	Binongko

Sumber: Data Primer, 2023.

Komunitas Nelayan Wangi-Wangi (KOMANANGI) merupakan organisasi berbasis masyarakat yang menaungi nelayan Pulau Wangi-Wangi. KOMANANGI bekerja untuk melindungi, melestarikan dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal, melalui pemantauan, pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir. Kelembagaan lokal dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga pelatihan untuk memfasilitasi akses masyarakat pesisir ke kredit, asuransi dan pelatihan dalam usaha-usaha ekonomi pesisir.

Forum Kahedupa Toudani (FORKANI) merupakan organisasi masyarakat di Pulau Kaledupa yang memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam cara budidaya rumput laut yang baik, mengambil ikan dengan cara ramah lingkungan, pengawasan laut, kredit konservasi, membangun bank ikan dan pengelolaan perikanan gurita. Hal ini akan membantu meningkatkan hasil produksi dan pendapatan nelayan. Selain itu, membantu mempromosikan pariwisata pesisir yang berkelanjutan dengan mengembangkan infrastruktur pariwisata, mengatur aktivitas wisata dan melindungi lingkungan alam. Sehingga pariwisata yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan lokal dan menciptakan lapangan kerja. Kelembagaan lokal dapat membantu memfasilitasi kemitraan antara sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah pusat untuk mendukung proyek-proyek ekonomi pesisir yang berkelanjutan seperti pengembangan pelabuhan, pusat pengolahan ikan atau fasilitas pariwisata. di Indonesia, Pengelolaan Berbasis Masyarakat (CBM) dalam pariwisata pantai telah menunjukkan potensi tetapi membutuhkan kemitraan yang lebih jelas yang melibatkan pihak ketiga dan sektor swasta untuk meningkatkan manfaat dan menarik investasi (Akbar & Nurpita, 2020).

Komunitas Nelayan Tomia (KOMUNTO) adalah organisasi berbasis komunitas yang terdiri dari perwakilan kelompok nelayan di Tomia Timur, Indonesia. Organisasi ini dibentuk sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap penangkapan ikan komersial asing, penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak, dan kurangnya kepemimpinan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam Wakatobi secara berkelanjutan. Inisiatif ini mendukung pengelola sumber daya alam lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini mendorong partisipasi lokal dalam zonasi dan perencanaan tata ruang Taman Nasional Wakatobi dan menetapkan tiga kawasan lindung di sekitar Pulau Tomia, sehingga stok ikan

dapat tumbuh kembali. Sumbangan anggota digunakan untuk memberikan layanan pinjaman dan dukungan kepada anggota yang membutuhkan.

## KESIMPULAN

Peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di kawasan Taman Nasional Wakatobi, yaitu mensosialisasikan penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan sehingga menjaga ukuran minimum dan musim tangkap ikan, populasi ikan tetap berkelanjutan, menjaga produksi ikan dalam jangka panjang; menerapkan metode pengelolaan dan perlindungan laut berbasis kearifan lokal (Metode Sasi, yaitu sistem buka tutup didaerah budidaya rumput laut dan gurita selama 3 bulan), bertujuan meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan produksi rumput laut; memajukan program kemitraan konservasi sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kawasan konservasi; mendorong keterlibatan kelompok nelayan dalam pengolahan dan pemrosesan hasil tangkapan seperti pengeringan ikan, pengawetan atau pengolahan makanan laut, bertujuan meningkatkan nilai tambah, menciptakan peluang bisnis lokal; mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan lokal dan membantu masyarakat pesisir untuk mengatasi kemiskinan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga pelatihan dalam usaha-usaha ekonomi pesisir; mengawasi dan mengatur penggunaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan berbasis masyarakat hukum adat sebagai upaya menjaga daya dukung lingkungan, mata pencaharian atau sumber ekonomi utama masyarakat pesisir; dan membantu mempromosikan pariwisata pesisir dan laut yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Akbar, S. I., & Nurpita, A. (2020). Potential Partnership of Community-Based Management in Supporting the Utilization of Sustainable Resources in Indonesian Coastal Tourism. *Proceedings of the 6th Annual International Conference on Management Research (AICMaR 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200331.029>
- Aprilla, R. M., Musiani, M., Chaliluddin, C., Djamani, R., & Muhammad, M. (2022). Identification Environmentally Friendly Fishing Gear Tools Based on the Code of Conduct for Responsible Fisheries at Aceh Barat Daya. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Indonesia*, 2(3), 162–170. <https://doi.org/10.24815/jkpi.v2i3.28576>
- Asiati, D., & Nawawi, N. (2017). Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 103. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.204>
- Carvalho, F., Castello, L., Ferreira, B., McDonald, G., & Power, M. (2021). Gear selectivity of functional traits in coral reef fisheries in Brazil. *Coral Reefs*, 40(6), 1915–1929. <https://doi.org/10.1007/s00338-021-02192-w>
- Firmansyah, F., Musthofa, A., Estradivari, D., Handayani, C., Ahmadi, G. N., & Harris, J. (2016). Satu dekade pengelolaan Taman Nasional Wakatobi: Keberhasilan dan tantangan konservasi laut. *World Wide Fund for Nature, Jakarta, Indonesia) Doi*, 10, M9.
- Harun, A. A. (2022). Bajo's Living Law on Environmental Preservation to Support Economic Improvement. *Dialogia Iuridica*, 14(1), 076–094. <https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5359>
- Kaya, I. R. G., Hutabarat, J., & Bambang, A. N. (2018). "Sasi" A New Path to Sustain Seaweed Farming From Up-Stream to Down-Stream in Kotania Bay, Molucass. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 9(2), 28–36. <https://doi.org/10.4018/IJSESD.2018040103>
- Kumalasari, A., Fauzi, N. E. A., & Oktsferly, F. J. (2023). Nelayan dan Perilaku Konsumtif (Studi Etnografi pada Masyarakat Kecamatan Muncar Banyuwangi). *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(2), 76–90. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.428>
- Marlina, M., Sumarni, S., Astina, I. K., & Susilo, S. (2020). Social-economic adaptation strategies of bajo mola fishers in wakatobi national park. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 34(1), 14–19. <https://doi.org/10.30892/gtg.34102-613>

- Monteiro-Rodrigues, S., Xavier, P., & Gomes, A. (2023). A Indústria Lítica Da Zona Industrial De Bouro (Gandra, Esposende, Nw De Portugal) – Contributo Para O Estudo Do Acheulense Do Minho Litoral. *Estudos Do Quaternário / Quaternary Studies*, 23, 1–15. <https://doi.org/10.30893/eq.v0i23.208>
- Nugroho, B. A., Wicaksono, G. R. A., Tjahjanto, A. D., Muflih, A. B., Arditama, A., Pamungkas, T. O., Zaidan, A. R., & Nugroho, A. (2024). Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Upaya Penataan Kawasan Waduk Cengklik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(1), 110–115. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i1.778>
- Nurchayani, R. T., Budijanto, B., Deffinika, I., & Susilo, S. (2022). Persepsi masyarakat nelayan terhadap pendidikan anak di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(8), 735–746. <https://doi.org/10.17977/um063v2i8p735-746>
- Ophman, N.-B., Flavien, K.-M. E., Rodrigue, E. S., Paul, S. P., Tabikam, A. I., & Jules, P. R. (2023). Evaluating the sustainability of fishery resources and fishing gears: Case study of Ngoyè and Elabè, Kribi, South Cameroon. *International Journal of Fisheries and Aquatic Studies*, 11(1), 57–64. <https://doi.org/10.22271/fish.2023.v11.i1a.2773>
- Pomeroy, R. S., & Rivera-Guieb, R. (2005). *Fishery co-management: a practical handbook*. CABI.
- Prihatiningsih, Taufik, M., Baihaqi, Yusuf, H. N., Fauzi, M., Hufiadi, Chodrijah, U., Panggabean, A. S., Pane, A. R. P., & Hartati, S. T. (2023). Characteristics of coral reef fisheries in the Wakatobi islands. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1137(1), 012020. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1137/1/012020>
- Rialdy, N., & Putri, S. Y. (2022). Bagaimana Cara Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan, Meningkatkan Kreativitas Masyarakat Serta Membangun Edukasi Untuk Membangkitkan Semangat Belajar Pada Anak Usia Dini Di Desa Pematang Johar. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(3), 61–67. <https://doi.org/10.53695/jas.v3i3.798>
- Rumolo, P. (2023). Marine Fisheries Management. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(7), 1377. <https://doi.org/10.3390/jmse11071377>
- Sihite, T. Y. M. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelompok Nelayan Terbaik Menerapkan Metode Copras. *Informasi Dan Teknologi Ilmiah (INTI)*, 7(2), 106–110.
- Warner, R. M. (2014). Conserving marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction: co-evolution and interaction with the law of the sea. *Frontiers in Marine Science*, 1. <https://doi.org/10.3389/fmars.2014.00006>
- Yayi Laksmi, N. P., & Prima Dewi, G. A. A. (2022). Kewenangan Masyarakat Adat Atas Pengelolaan Sumber Daya Laut di Wilayah Pesisir Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2180. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p18>
- Yiu, E. (2022). Traditional knowledge in the management of seascapes. In *Routledge Handbook of Seascapes* (pp. 369–384). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429273452-29>